

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sastra merupakan hasil karya manusia yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat tempat karya tersebut lahir. Damono (1984) menyatakan bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan, sedangkan kehidupan itu sendiri merupakan kenyataan sosial. Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Wellek dan Warren (1990) yang menempatkan sastra sebagai institusi sosial yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Berdasarkan pandangan tersebut, karya sastra dapat dipahami sebagai medium yang di dalamnya tersimpan berbagai persoalan sosial yang berkembang di dalam masyarakatnya. Salah satu persoalan sosial yang sering diangkat dalam karya sastra adalah persoalan mengenai penyalahgunaan kekuasaan, khususnya kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang lebih unggul terhadap pihak yang lebih lemah.

Persoalan penyalahgunaan kekuasaan memperoleh perhatian yang serius di Jepang. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (厚生労働省) (*Kōseirōdōshō*) menyatakan bahwa pengaduan terkait *power harassment* yang masuk ke kantor tenaga kerja daerah telah melampaui 60.000 kasus pada tahun fiskal 2024 (*Kōseirōdōshō*, 2025). Selain itu, dalam Survei Kondisi Nyata *Harassment* di Tempat Kerja tahun 2023, sebanyak 64,2% perusahaan menyatakan pernah menerima konsultasi mengenai *power harassment* dalam kurun tiga tahun terakhir (*Kōseirōdōshō*, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan bukan sekadar

persoalan yang muncul dalam ranah wacana, melainkan persoalan sosial nyata yang telah terukur secara resmi oleh negara.

Istilah *power harassment* (パワーハラスメント) atau yang sering disingkat menjadi *pawahara* pertama kali dikemukakan oleh Okada Yasuko pada tahun 2001. Istilah ini termasuk ke dalam *wasei-eigo*, yaitu kosakata bahasa Inggris yang diciptakan di Jepang. Okada (2011) mengartikan *power harassment* sebagai tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan, seperti wewenang jabatan, yang secara terus-menerus melanggar kepribadian serta martabat seseorang di luar batas kewajaran, sehingga memperburuk lingkungan kerja korbannya. Konsep yang pada awalnya berkembang dari praktik di dunia kerja tersebut kemudian dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang. Kementerian tersebut menetapkan tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai *power harassment*, yaitu 「優越的な関係を背景とした言動」 (*yūetsuteki na kankei o haikai to shita gendō*) atau ucapan dan tindakan yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang lebih unggul, tindakan yang melampaui batas kewajaran dalam pekerjaan, dan tindakan yang merusak lingkungan kerja korban (*Kōseirōdōshō*, 2020).

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa *power harassment* merupakan istilah yang khas Jepang, dan hal ini berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat Jepang itu sendiri. Okada berpendapat bahwa norma yang sangat mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu menyebabkan tumbuhnya anggapan 「組織で生きるためには我慢

が美德」 (*soshiki de ikiru tame ni wa gaman ga bitoku*), yang berarti bahwa demi dapat bertahan di dalam sebuah organisasi, kesabaran dianggap sebagai suatu kebaikan (Okada, 2022). Anggapan tersebut membuat korban cenderung memendam persoalan dan menahan diri. Meskipun istilah *power harassment* pada mulanya lahir dari lingkungan kerja, sebagaimana konsep mobbing dalam kajian Barat yang dikemukakan oleh Leymann (1990), *power harassment* melalui revisi Undang-Undang Promosi Kebijakan Ketenagakerjaan pada tahun 2019 yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 (Koyo Clean Planner, 2025), serta munculnya berbagai istilah turunan seperti *academic Harassment* (*akahara*), yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berkuasa di lingkungan pendidikan terhadap pihak yang lebih lemah, yang dipahami sebagai bentuk *power harassment* di luar ranah kantor (Miidas, 2024; Kaonavi, 2025). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini istilah *power harassment* dipahami dalam makna yang luas, yaitu penyalahgunaan hubungan kekuasaan oleh pihak yang lebih unggul terhadap pihak yang lebih lemah.

Persoalan *power harassment* tersebut tergambar secara mendalam dalam beberapa karya sastra Jepang yang berdasar pada peristiwa nyata. Salah satu karya yang menggambarkan dengan kuat adalah film *Tsumi no Koe*(罪の囁き) yang berarti "Suara sebuah Dosa", karya sutradara Doi Nobuhiro yang dirilis pada tahun 2020. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Shiota Takeshi pada tahun 2016. Karya tersebut berdasar pada Kasus Glico-Morinaga (グリコ・森永事件), yaitu kasus pemerasan terhadap perusahaan yang mengguncang Jepang pada tahun 1984 sampai 1985 dan

hingga saat ini belum terpecahkan. Kasus Glico-Morinaga (1984–1985) merupakan rentetan aksi terorisme korporat, penculikan, dan pemerasan yang menargetkan perusahaan-perusahaan konfeksi raksasa di Jepang, dengan target utama Ezaki Glico dan Morinaga. Aktor di balik kejahatan ini adalah kelompok anonim yang menamai diri mereka "Monster dengan 21 Wajah" (The Monster with 21 Faces). Kelompok ini memulai aksinya dengan menculik Presiden Direktur Glico pada Maret 1984 untuk meminta uang tebusan masif. Setelah korban berhasil kabur, teror bergeser menjadi manipulasi media dan ancaman keamanan pangan. Pelaku secara rutin mengirimkan surat ejekan ke kepolisian dan surat kabar, lalu memuncak pada ancaman bahwa mereka telah meletakkan permen dan cokelat Morinaga yang disuntik racun sianida di rak-rak supermarket.

Teror ini memicu kepanikan berskala nasional yang memaksa perusahaan menarik jutaan produk dari pasaran, menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Ironisnya, pelaku tidak pernah tertangkap. Pasca bunuh dirinya seorang pejabat kepolisian akibat tekanan kegagalan menangkap pelaku, kelompok ini mengirimkan surat terakhir pada Agustus 1985 yang menyatakan bahwa mereka berhenti menyiksa perusahaan makanan, lalu menghilang tanpa jejak. Identitas mereka tetap menjadi misteri hingga masa kedaluwarsa kasus habis pada tahun 2000.

Di dalam film *Tsumi no Koe*, kasus tersebut disamarkan menjadi "Kasus Gin-Man". Kualitas karya ini telah diakui secara luas. Novelnya memperoleh Penghargaan Yamada Fūtarō yang ketujuh, sedangkan filmnya

memperoleh Penghargaan Skenario Terbaik dalam Japan Academy Prize ke-44 (Eiga.com, 2020).

Keunggulan utama film *Tsumi no Koe* terletak pada sudut pandangnya yang berbeda dari kebanyakan karya bertema kejahatan. Film ini tidak berfokus pada pelaku maupun pada usaha memecahkan kasus, tetapi menyoroti nasib tiga orang anak yang suaranya direkam dan digunakan untuk kejahatan pemerasan tanpa mereka kehendaki. Pemilihan tema seperti ini berawal dari keresahan pengarangnya. Dalam wawancara yang dimuat pada majalah Voice edisi September 2017, Shiota Takeshi mengungkapkan bahwa setelah ia menjadi seorang ayah, ia semakin merasa bahwa 「子どもという宝物を事件に利用するなんて許せない」 (*kodomo to iu takaramono o jiken ni riyō suru nante yurusenai*), yang berarti bahwa menggunakan anak sebagai sesuatu yang berharga untuk kepentingan kejahatan adalah hal yang tidak dapat dimaafkan (Shiota, 2017). Shiota menambahkan bahwa justru melalui karya fiksi ia dapat menggambarkan masa depan anak-anak yang telah dijadikan alat kejahatan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh produser film, Nasuda Jun, yang menyatakan bahwa 「子どもを犯罪に巻き込むことは社会から希望を奪うこと」 (*kodomo o hanzai ni makikomu koto wa shakai kara kibō o ubau koto*), yang berarti bahwa melibatkan anak ke dalam kejahatan sama saja dengan merampas harapan dari masyarakat (Nasuda dalam Fujisan Trends, 2020). Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak menjadi inti dari karya ini.

Di dalam film tersebut, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya muncul dalam satu bentuk, tetapi dalam beberapa bentuk yang saling bertumpuk. Di dalam film *Tsumi no Koe* penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya muncul dalam satu kasus, tetapi dalam beberapa peristiwa yang saling berkaitan. Kasus pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap anak. Kasus kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan kelompok kriminal terhadap keluarga yang lemah. Kasus ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan institusi dan aparaturnya. Kasus keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan simbolik pelaku terhadap media dan masyarakat.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai cerminan keadaan sosial masyarakat yang melahirkannya, sehingga karya sastra dapat dibaca sebagai gambaran persoalan nyata yang terjadi di dalam masyarakat (Ratna, 2004). Secara khusus, penelitian ini menggunakan pandangan mengenai sastra sebagai cermin masyarakat yang dikemukakan oleh Watt (1964) sebagai langkah awal untuk memetakan kenyataan sosial yang melatarbelakangi praktik *pawahara* dalam film.

Selain itu, konsep *power harassment* (Okada, 2011; *Kōseirōdōshō*, 2020; Leymann, 1990) digunakan sebagai landasan konseptual utama, dengan dibantu oleh konsep relasi kuasa dari Foucault dan konsep kekerasan struktural dari Galtung (1969) sebagai alat untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menembus ranah keluarga dan individu. Pendekatan ini dianggap tepat karena film *Tsumi no Koe* berdasar pada

peristiwa sosial yang benar-benar terjadi, sehingga menuntut pembacaan yang menghubungkan isi karya dengan keadaan sosial di luarnya.

Keaslian penelitian ini dapat ditunjukkan melalui penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema. Penelitian mengenai *power harassment* dalam karya sastra Jepang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Risdiyana (2015) meneliti tindak *pawahara* pada tokoh Tsunoda Miki dalam drama Nakanai to Kimeta Hi dengan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt. Andini (2017) meneliti dampak psikologis *pawahara* pada tokoh yang sama dalam drama tersebut. Alawiah (2025) meneliti bentuk-bentuk pelecehan di lingkungan kerja, termasuk *pawahara*, dalam anime Zom 100: Bucket List of the Dead. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa tema *power harassment* memang telah menjadi kajian dalam bidang sastra Jepang.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini, baik dari segi objek maupun dari segi cakupan kajian. Dari segi objek, seluruh penelitian terdahulu menggunakan objek berupa drama atau anime, dan sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan satu pun penelitian yang menjadikan film *Tsumi no Koe* karya Doi Nobuhiro sebagai objek kajian, baik dalam kajian *power harassment* maupun kajian lainnya. Dari segi cakupan kajian, penelitian terdahulu membatasi *power harassment* pada lingkungan kerja, sedangkan penelitian ini mengkaji *power harassment* dalam makna yang lebih luas, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang juga terjadi di ranah keluarga, kriminal, dan sosial.

Berdasarkan penelusuran tersebut, penelitian ini memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan. Keaslian tersebut terletak pada objek penelitian, yaitu film *Tsumi no Koe* yang belum pernah diteliti sebelumnya, sekaligus pada cakupan kajian yang memperluas pemahaman *power harassment* ke luar lingkungan kerja. Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah ada, melainkan melengkapi dan memperluas kajian *power harassment* dalam bidang sastra Jepang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi sastra terhadap film Jepang masa kini, khususnya film yang berdasar pada peristiwa sosial nyata. Secara sosial, penelitian ini berusaha untuk kembali menyuarakan pihak-pihak yang terpinggirkan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana yang digambarkan di dalam film *Tsumi no Koe*, persoalan tersebut tidak pernah benar-benar selesai meskipun peristiwanya telah lama berlalu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **"Representasi *Pawahara* dalam Film *Tsumi no Koe* Karya Nobuhiro Doi: Kajian Sosiologi Sastra"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana *power harassment* yang direpresentasikan dalam film *Tsumi no Koe* karya Doi Nobuhiro?
2. Bagaimana nilai sosial Jepang memengaruhi *power harassment* yang terstruktur dalam film *Tsumi no Koe*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama.

1. Mengetahui *power harassment* yang direpresentasikan dalam film *Tsumi no Koe* karya Doi Nobuhiro.
2. Mengetahui nilai sosial Jepang yang mempengaruhi *power harassment* dalam film *Tsumi no Koe*.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian terarah dan mendalam pada fokusnya, ditetapkan batasan sebagai berikut.

1. Objek penelitian dibatasi pada film *Tsumi no Koe* karya sutradara Doi Nobuhiro yang dirilis pada tahun 2020, dan tidak mencakup novel aslinya karya Shiota Takeshi.

2. Penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk *power harassment* dalam makna yang luas, yaitu penyalahgunaan hubungan kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah, beserta kaitannya dengan kondisi nilai sosial masyarakat Jepang.
3. Data yang dianalisis dibatasi pada adegan dan dialog di dalam film yang menunjukkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
4. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang dimana penelitian hanya berfokus mengkaji sosiologi karya sastra dengan dibantu oleh konsep *power harassment*, konsep relasi kuasa, dan konsep kekerasan struktural.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis.

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian di bidang sosiologi sastra, khususnya kajian terhadap film Jepang yang berdasar pada peristiwa sosial yang nyata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsep *power harassment* yang selama ini banyak dibatasi pada lingkungan kerja, dengan menunjukkan bahwa konsep tersebut dapat digunakan untuk membaca persoalan kekuasaan dalam ranah yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, yang

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sastra maupun budaya Jepang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai persoalan penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat Jepang sebagaimana yang tergambar dalam karya sastra.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai representasi *pawahara* (*power harassment*) dalam karya sastra Jepang, khususnya drama dan film, telah beberapa kali dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang beragam. Sebagian besar penelitian tersebut memanfaatkan pendekatan sosiologi sastra dan bertujuan mengungkap bentuk-bentuk *pawahara* sebagai cerminan persoalan sosial di dunia kerja Jepang. Namun demikian, kajian-kajian terdahulu pada umumnya masih membatasi *pawahara* pada lingkungan kerja (ranah profesional) dan belum menjangkau penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di ranah lain, seperti keluarga, kelompok kriminal, maupun institusi sosial.

Kajian mengenai *pawahara* dalam karya sastra pernah diteliti oleh Risdiyana pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul "Tindak Pawa Hara pada Tokoh Tsunoda Miki dalam Drama *Nakanai to Kimeta Hi* Karya Sutradara Junichi Ishikawa dan Hidenori Joho". Dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt yang memandang sastra sebagai cerminan masyarakat, penelitian tersebut menemukan sejumlah bentuk *pawahara* yang dialami tokoh utama di lingkungan kerja, seperti serangan verbal, serangan mental, dan tuntutan yang berlebihan. Meskipun demikian, cakupan penelitian

ini masih terbatas pada *pawahara* di lingkungan kerja dan belum menyoroti penyalahgunaan kekuasaan di ranah keluarga, kriminal, maupun sosial.

Selanjutnya, kajian serupa pernah diteliti oleh Izumi pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Tindak *Pawahara* dalam Drama *Hanzawa Naoki*" dari Universitas Pakuan. Dengan pendekatan sosiologi sastra, penelitian tersebut memaparkan berbagai bentuk *pawahara* yang dialami tokoh Hanzawa Naoki di lingkungan kerja perbankan sebagai gambaran persoalan sosial di dunia kerja Jepang. Namun, sebagaimana penelitian sebelumnya, fokus kajian ini masih terpusat pada *pawahara* di lingkungan kerja dan belum menunjukkan dimensi sosiologis untuk membaca akar sekaligus dampak fenomena tersebut secara utuh.

Berdasarkan paparan penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa kajian sebelumnya masih menitikberatkan *pawahara* sebagai persoalan yang hanya berlingkup di lingkungan kerja saja. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji representasi *pawahara* sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang menembus berbagai ranah seperti di lingkungan keluarga, kelompok kriminal, hingga institusi sosial dan media dimensi sosiologis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan yang terletak pada objek kajian, yaitu film *Tsumi no Koe* (2020) karya Nobuhiro Doi yang belum pernah dianalisis dari perspektif *pawahara*; pada perluasan cakupan konsep *pawahara* melampaui lingkungan kerja; serta pada pendekatan sosiologi sastra yang mengintegrasikan *tate shakai* (Nakane Chie) beserta konsep-konsep sosiologis lainnya untuk mengungkap akar sekaligus dampak fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur keaslian (*state of the art*) baik dari sisi

objek yang dikaji maupun dari sisi pendekatan dan cakupan analisis yang lebih luas dan terpadu.



